KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Waspada cuaca ekstrem, komisi V minta perkuat mitigasi
Tanggal : Sabtu, 21 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Waspada Cuaca Ekstrem

Komisi V Minta Perkuat Mitigasi

ANGGOTA Komisi V DPR Sudjatmiko mendesak Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah antisipasi secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor terkait. Mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga penanggulangan bencana.

Desakan itu menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 16 November 2026. Laporan itu mencatat, curah hujan 241 milimeter per hari di Jawa Barat pada 12-15 November 2026. Hujan sangat lebat tercatat di Bengkulu 158 milimeter, Gorontalo 147 milimeter, dan Aceh 127 milimeter per hari.

BMKG juga menetapkan status Siaga potensi hujan lebat di 18 provinsi pada 17-19 November 2026, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi itu kian meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sudjatmiko menilai, kondisi itu perlu jadi perhatian serius Pemerintah. Mitigasi tidak cukup hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana, tapi perlu dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. "Pemerintah tidak boleh menunggu banjir, longsor, jalan terputus, atau korban jiwa baru bergerak," tegasnya, Rabu (18/11/2026).

Dia meminta BMKG memperkuat pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini agar informasi potensi cuaca ekstrem bisa disampaikan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, hingga jalur evakuasi di wilayah rawan.

Berikutnya, dia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memeriksa secara menyeluruh infrastruktur yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem, seperti sungai, tanggul, drainase, bendungan, jembatan, dan jalan nasional. Pembersihan saluran air, penanganan titik rawan banjir, serta penguatan lereng di kawasan rawan longsor perlu jadi prioritas.

Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama operator transportasi memperkuat pemantauan kondisi cuaca dan memastikan standar keselamatan benar-benar dijalankan. Termasuk membatasi operasional apabila kondisi membahayakan pengguna jasa.

Selain itu, Pemda perlu memperbarui peta wilayah rawan bencana, menyiapkan rencana kontinjensi, serta mengaktifkan posko kesiapsiagaan. Komunikasi peringatan dini juga perlu terus diperkuat hingga tingkat desa, kelurahan, dan RT/RW. "Sehingga informasi peringatan bisa cepat diterima masyarakat di lingkungan masing-masing," ujarnya. ■ PYB